

Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Oleh : Gunawan Sumodiningrat



Gunawan Sumodiningrat, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Analisa Ekonomi dan Statistik Bappenas, disamping sebagai staf peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan serta dosen Fakultas Ekonomi UGM, yang dilahirkan di Solo, tahun 1950. Lulus dari Fakultas Ekonomi UGM, Jurusan Ekonomi Pertanian, 1974. Tahun 1977 memperoleh M.Ec pada bidang yang sama dari Universitas Minnesota, USA, 1982. Aktif mengikuti seminar-seminar tentang ekonomi pertanian di dalam dan luar negeri.

I. Pendahuluan

Salah satu alat kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi gerak perekonomian adalah lewat kebijaksanaan fiskal yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam tahun 1992-1993 dianggarkan berimbang pada tingkat Rp 56.108,6 milyar. Melalui APBN ini pemerintah dapat berupaya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja, inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Namun demikian sejauh mana efektivitas kebijaksanaan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor-faktor

eksternal, termasuk gerak perekonomian dunia. Hal ini bisa terjadi karena pada hakekatnya gerak perekonomian Indonesia adalah perekonomian terbuka, sehingga gerak perekonomian dunia mempunyai implikasi pula pada perekonomian dunia. Oleh karena itulah sebelum membicarakan peran dan kebijaksanaan pemerintah dalam perekonomian maka dalam makalah ini diuraikan terlebih dahulu beberapa aspek mengenai perekonomian dunia, disamping mengenai perkembangan ekonomi Indonesia sendiri.

II. Perekonomian Dunia

Bagi suatu negara yang menganut perekonomian terbuka, perkembangan

ekonomi dunia mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian dalam negeri baik melalui transaksi perdagangan maupun kerjasama ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi dunia dan negara yang menjadi mitra dagang merupakan sumber permintaan untuk produk dalam negeri yang ditawarkan baik berupa komoditi primer, antara lain : produk-produk pertanian dan pertambangan, maupun komoditi industri pengolahan. Selain transaksi pasar barang, hubungan dengan luar negeri juga dilakukan dipasar uang dan pasar modal internasional. Perekonomian dunia yang semakin berkembang merupakan permintaan potensial dan memberikan peluang besar bagi perkembangan perekonomian dalam negeri.

Beberapa indikator yang perlu diamati: (1) Pertumbuhan ekonomi dunia, (2) Perdagangan Dunia, (3) Tingkat Inflasi, (4) Hutang Luar Negeri, (5) Debt Service Rasio dan (6) Tingkat bunga.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Berdasarkan laporan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF), selama tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1984 adalah sebesar 4,4 %. Angka ini merupakan angka pertumbuhan paling tinggi selama periode tersebut. Setelah tahun 1984, tingkat pertumbuhan ekonomi dunia terus menurun, kecuali untuk tahun 1988 angka pertumbuhan mencapai sebesar 4,1 %. Tingkat pertumbuhan ini turun menjadi 2,2 % pada tahun 1990 bahkan pada tahun

1991 hanya tumbuh sebesar 0,9 %. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Timur Tengah. Perekonomian negara-negara Eropa dan Timur Tengah 1991 mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 9,6 % dan 4,0 %. Faktor utama dari mandegnya perekonomian tersebut adalah pergolakan politis di Eropa dan perang teluk di Timur Tengah. Pada tahun 1992, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 %. Perkiraan ini didasarkan pada membaiknya perekonomian Amerika Serikat, pulihnya kegiatan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan merendahnya konflik di negara-negara Eropa.

Pada tahun 1988, pertumbuhan ekonomi negara-negara industri adalah sebesar 4,5 %. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang mencapai 3,9 %. Pada tahun yang sama pertumbuhan perekonomian dunia adalah sebesar 4,4 %. Pada tahun-tahun berikutnya angka pertumbuhan ini semakin mengecil sehingga pada tahun 1991 pertumbuhan ekonomi dunia hanya tumbuh sebesar 0,9 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara industri adalah sebesar 1,3 % dan negara-negara sedang berkembang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,6 %. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia relatif paling stabil dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5 %. Dari perbandingan angka-angka pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat bahwa negara-negara industri mendominasi perekonomian dunia. Meskipun dominasi ini nampaknya masih

akan berlanjut namun peran negara-negara Asia dalam perekonomian dunia akan semakin besar.

2.2. Perdagangan

Dari Laporan Tahunan IMF 1991 dapat diamati bahwa perkembangan volume perdagangan dunia menunjukkan penurunan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1991. Pada tahun 1988, pertumbuhan volume perdagangan mencapai puncaknya, yakni sebesar 9,1 %. Pertumbuhan ini besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan volume perdagangan terus menerus dan hanya mencapai 0,6 % pada tahun 1991. Rendahnya pertumbuhan volume perdagangan ini diikuti oleh mengecilnya angka pertumbuhan ekonomi dunia.

Harga ekspor komoditi non migas ternyata tidak mempengaruhi perkembangan volume perdagangan internasional. Harga komoditi non migas mengalami penurunan sejak tahun 1988. Pada tahun 1989 turun dengan -0,3 % dalam tahun 1990 bahkan menurun lebih rendah lagi yakni sebesar 7,9 % dan tahun 1991 menurun 2,7 %. Dengan adanya recovery di beberapa negara diperkirakan harga komoditi non migas akan meningkat sebesar 3,2 % dalam tahun 1992.

Dalam pada itu, perkembangan harga ekspor migas mempunyai gambaran yang berbeda dengan perkembangan harga komoditi non migas. Sejak tahun 1987 harga migas cenderung meningkat cukup tinggi kecuali tahun 1988 yang turun 20,5 %. Pada tahun 1990 harga migas tumbuh sebesar 28,3 %. Tetapi pada tahun 1991

harga mengalami penurunan sebesar 22,1 %. Penurunan harga migas ini erat kaitannya dengan Perang Teluk dimana negara-negara yang tergabung dalam OPEC melakukan penjualan dalam jumlah besar sehingga jumlah yang tersedia di pasar melimpah akibatnya harga migas di pasar luar negeri turun. Kemudian dengan berakhirnya Perang Teluk keadaan pasar luar negeri mulai stabil dan diperkirakan pada tahun 1992 terjadi perbaikan. Sehingga harga naik sebesar +4,0 % dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian sebesar angka ini belum kembali pada tingkat harga tahun 1990.

Perubahan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kenaikan volume ekspor dunia semakin mengecil dan fluktuasi harga komoditi primer di pasar internasional kurang menguntungkan bagi negara berkembang. Dengan demikian strategi merebut pasar luar negeri masih terus diupayakan melalui peningkatan efisiensi dan menjaga kualitas produksi dengan standar internasional.

2.3. Inflasi

Perubahan tingkat harga/inflasi merupakan salah satu penentu bertambah/berkurangnya daya beli masyarakat di suatu negara. Tingkat inflasi di negara-negara industri terus meningkat mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 1990. Tingkat inflasi rata-rata pertahun adalah 4,8 %. Kecenderungan kenaikan harga mengakibatkan kelesuan ekonomi negara-negara kelompok industri. Namun demikian angka inflasi diperkirakan akan turun pada tahun 1991.

Di negara-negara sedang berkembang inflasi adalah searah dengan

perkembangan inflasi di negara-negara industri. Tingkat inflasi ini senantiasa meningkat mulai dari tahun 1986 (31,5%) menjadi 104,8 %, pada tahun 1990. Namun demikian pada tahun 1991 diperkirakan turun menjadi 16,1 %.

Tingkat inflasi yang terkendali diharapkan mempunyai dampak positif terhadap daya beli masyarakat sehingga permintaan ekspor akan meningkat. Bertambahnya permintaan ekspor berarti peluang bagi negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan devisa. Tingkat inflasi yang tinggi memberi gambaran bahwa demand melebihi supply. Dalam perdagangan internasional, negara pengspor justru menarik manfaat dari kenaikan harga ini. Tetapi bagi negara yang mengimpor dari negara lain dengan tingkat inflasi tinggi harus menyediakan dana lebih banyak untuk membayar volume produk yang sama.

2.4. Hutang Luar Negeri

Dalam lingkup ekonomi internasional, tingkat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dapat digunakan sebagai indikator kematangan suatu negara. Tingkat kemandirian ini dilihat dari proporsi pinjaman luar negeri. Dari segi perputaran kegiatan ekonomi/bisnis, hutang luar negeri akan bermanfaat bagi suatu negara jika negara tersebut mampu mendayagunakan hutang luar negeri untuk kegiatan produktif. Kegiatan produktif ini diarahkan pada pengolahan dan peningkatan produk dalam negeri menjadi komoditi ekspor. Di samping itu diharapkan adanya efek multiplier dari penggunaan pinjaman luar negeri tersebut.

Namun demikian keadaan ini amat langka. Hutang luar negeri biasanya terkait erat

dengan negara pemberi pinjaman. Barang yang digunakan dalam kegiatan pembangunan biasa harus didatangkan dari negara sumber dana.

Disuatu negara, hutang luar negeri memberikan indikasi potensi atau peluang yang besar bagi bisnismen, karena hutang luar negeri yang besar berarti kemungkinan investasi juga semakin besar, sehingga menciptakan kesempatan usaha dalam ekonomi negara yang bersangkutan.

Hutang luar negeri dibedakan dalam hutang pemerintah dan hutang swasta. Hutang pemerintah umumnya digunakan untuk investasi yang bersifat public utilities, berupa prasarana sosial maupun prasarana ekonomi. Hutang swasta adalah langsung digunakan oleh swasta dalam kegiatan ekonomi yang profit oriented.

Semakin besar suatu negara semakin besar potensi suatu negara untuk membangun. Namun demikian perlu dicatat bahwa setiap penggunaan hutang harus dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan mampu mencapai surplus. Pembayaran kembali hutang berikut bunganya harus diperoleh dari kegiatan yang diciptakan melalui dana yang dibiayai oleh hutang tersebut.

Dari angka-angka IMF terlihat bahwa nilai hutang negara sedang berkembang semakin meningkat dari tahun ketahun. Diperkirakan bahwa pada tahun 1992 nilai pinjaman luar negeri mencapai US \$ 1.38 milyar. Besarnya hutang luar negeri memberikan indikasi bahwa semakin besar dana yang diperlukan untuk membangun di negara sedang berkembang, dilain pihak kemampuan negara donor dalam membantu negara sedang berkembang semakin besar.

2.5. Debt Service Ratio

Debt Service Ratio adalah perbandingan antara kewajiban membayar cicilan hutang luar negeri dengan penerimaan ekspor dari luar negeri. Angka ini mengukur kemampuan suatu negara dalam perdagangan internasional. Semakin rendah angka DSR berarti semakin baik karena kewajiban suatu negara mengalokasikan dananya untuk membayar pinjaman atau kewajiban lain keluar negeri semakin kecil. Jika kemampuan negara untuk mendapatkan pembayaran dari luar negeri cukup besar maka penerimaan dari luar negeri tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain DSR dapat pula digunakan sebagai indikator kepatuhan dari suatu negara terhadap pembayaran cicilan hutang luar negeri. Negara dengan DSR yang tinggi memberikan gambaran kepatuhan yang rendah, sebaliknya dengan DSR yang rendah memberikan indikasi kepatuhan yang tinggi. Negara dengan DSR rendah ini mempunyai peluang yang baik untuk dilakukan kerjasama dalam perdagangan internasional.

Negara Amerika Latin dan Afrika mempunyai angka rata-rata DSR tertinggi. Angka ini berfluktuasi dari tahun ketahun tergantung dari keperluan dana pembangunan yang diperlukan dan tergantung pula dari kesiapan dari negara donor untuk memberikan pinjaman. Negara-negara di benua Asia mempunyai rata-rata DSR rendah bahkan diperkirakan menurun pada tahun 1992 mendatang.

2.6. Kerjasama Internasional

Lembaga kerjasama internasional mempunyai peranan penting dalam

perekonomian Indonesia. Di samping lembaga dana internasional seperti internasional monetary found (IMF), Intern Governmental Group For Indonesia (IGGI), Asia Development Bank (ADD), juga organisasi perdagangan internasional termasuk : General Agreement on Tariff and Trade (GATT), UNCTAD, Internasional Coffee Organisation (ICO) Uruguay Round dan lain sebagainya. Peran lembaga kerjasama ini umumnya dapat mempengaruhi alokasi kuota ekspor maupun arus impor. Bagi negara-negara yang sedang berkembang yang mengandalkan pada ekspor komoditi dengan tingkat persaingan tinggi maka keikutsertaannya dalam kerja sama internasional adalah untuk menentukan "jatah" untuk dapat memenuhi kuota import suatu negara. Kuota impor di suatu negara umumnya pembatas pengembangan produksi dan perdagangan internasional yang dihadapi oleh negara yang berkembang terutama yang mengekspor produk-produk primer. Kerjasama ini tidak harus dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lain tetapi keikutsertaan swasta, dalam hal ini diwakili oleh bisnismen, adalah amat penting. Karena umumnya penghasil produk adalah bukan pemerintah tetapi juga swasta. Pengusaha-pengusaha swasta adalah yang paling banyak mengetahui permasalahan dalam perputaran diatas ekonomi.

2.7. LIBOR

Libor adalah tingkat bunga internasional yang digunakan sebagai patokan pinjaman komersial di pasar dunia. Tingkat bunga ini bervariasi

tergantung kepada kekuatan tarik menarik antara lain negara yang meminta dana komersial dan negara yang menawarkannya. Keseimbangan ini berkaitan dengan tingkat kemajuan ekonomi antar negara dan tersedianya dana internasional.

Tingkat bunga internasional ini juga digunakan juga sebagai patokan tingkat bunga yang akan terjadi di suatu negara. Umumnya tingkat bunga yang berlaku di suatu negara adalah sebesar LIBOR ditambah margin berupa pergeseran nilai kurs mata uang sekitar 3 % dan opportunity cost dari uang sekitar 3 % dengan demikian diperkirakan tingkat bunga dalam suatu negara kira-kira 6 % diatas LIBOR.

Sejak tahun 1989 angka LIBOR turun dari 9,3 % semester/enam bulan menjadi 6,7 % per semester/enam bulan pada tahun 1991. Angka LIBOR pada tahun 1992 diperkirakan akan sebesar 7,0 %. Angka LIBOR yang lebih tinggi pada tahun 1992 sejalan dengan perbaikan perekonomian dunia. Jika perekonomian membaik maka dalam jangka pendek permintaan dana meningkat sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga. Dengan perkiraan LIBOR sebesar 7,0 % ditambah margin sekitar 6 % yang diperlukan untuk menggerakkan dana luar negeri maka peluang di dalam negeri diharapkan akan meningkat karena bunga yang berlaku di dalam negeri akan lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku ini.

III. Perkembangan Ekonomi Indonesia

Disamping aspek luar negeri aspek dalam negeri merupakan kunci

keberhasilan pelaku ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi. Perekonomian Indonesia perlu diamati dari sisi pelaku ekonomi yakni sisi produsen, sisi konsumen dan sisi pemerintah melalui APBN. Dalam pada itu perlu pula diketahui tingkat penyebaran kesiapan pelaku ekonomi antar daerah (regional). Beberapa indikator yang perlu diketahui antara lain adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari GDP dan GNY baik dalam ukuran nominal, riil maupun per kapita.

3.1. Indikator Ekonomi Penting

3.1.1. Pertumbuhan GDP

Kegiatan ekonomi lazim diukur angka Produk Domestik Bruto (PDB=GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB=GNP). Karena dihitung dari seluruh kegiatan ekonomi dan sektor kegiatan ekonomi, maka angka ini dianggap merupakan ukuran yang memadai untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan angka ini pula dapat diamati adanya perubahan dalam struktur ekonomi atau struktur change.

Selama Repelita IV tahun 1985 sampai dengan tahun 1988, PDB tumbuh rata-rata 5,12 % per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1984 sebesar 6,7 %. Sejalan dengan tingkat kelesuan ekonomi dunia maka PDB tumbuh dengan angka lebih rendah yakni 2,5 % pada tahun 1985. Namun demikian kegiatan ekonomi nampak semakin meningkat dari tahun ketahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 1989 sebesar 7,4 %. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1989 tersebut merupakan hasil

dari proses yang terkait dalam seluruh kegiatan ekonomi. Namun demikian dengan keadaan ekonomi yang relatif lesu pada saat ini terutama di pasar luar negeri diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 1990 mencapai sedikit lebih rendah dari tahun 1989. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 1990 diperkirakan mencapai 7,4 %.

3.1.2. Pertumbuhan GDY

Dalam pada itu pendapatan Nasional Kotor (GDY = Gross Domestic Income) meningkat dengan rata-rata 2,45 % selama tahun 1985 - 1988. Sejak tahun 1989 laju kenaikan pendapatan nasional meningkat sejalan dengan kenaikan PDP yakni 7,4 % pada tahun 1989 dan diperkirakan meningkat dengan 10,5 % pada tahun 1990. Angka pertumbuhan GDY yang menyamai GDY memberikan indikasi bahwa terjadi keseimbangan antara kegiatan ekonomi di dalam negeri dan luar negeri, sehingga dapat pula diartikan bahwa nilai tambah yang diciptakan dalam proses kegiatan ekonomi sepenuhnya dinikmati kembali oleh pelaku ekonomi di dalam negeri.

3.1.3. Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan yang merupakan indikator dalam perdagangan internasional dapat merupakan ancaman bagi kegiatan ekonomi tetapi dapat pula dijadikan indikator kemajuan ekonomi. Semakin tinggi angka (negatif) transaksi berjalan menunjukkan perbandingan antar penerimaan dan pengeluaran pada transaksi internasional meliputi transaksi barang dan jasa semakin tinggi, yang berarti terjadi defisit. Tetapi transaksi ini meliputi arus jasa yang lebih banyak

diperlukan dalam proses pembangunan. Dengan demikian tingginya transaksi berjalan tidak harus dikhawatirkan asalkan indikator lain berkembang lebih baik dari angka defisit. Indikator lain tersebut antara lain adalah nilai cadangan devisa, tingkat inflasi DSR.

3.1.4. CADANGAN DEvisa

Perkembangan Cadangan Devisa yang semakin besar merupakan indikator semakin membaiknya kegiatan ekonomi di dalam negeri. Cadangan devisa negara senantiasa meningkat dari tahun ke tahun sejak dari US \$ 5,8 milyar pada tahun 1985 menjadi US \$ 6,6 milyar pada tahun 1989. Besarnya cadangan devisa ini diperkirakan meningkat menjadi US \$ 8,7 milyar dalam tahun 1990.

3.1.5. Inflasi

Dalam pada itu tingkat inflasi yang merupakan indikator yang mempengaruhi daya beli masyarakat diharapkan dapat ditekan pada tingkat yang terkendali. Tingkat inflasi yang tinggi berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing (competitiveness) suatu negara dalam perdagangan internasional. Semakin rendah tingkat inflasi memberikan indikasi meningkatnya daya beli masyarakat, namun demikian inflasi yang merupakan indeks kenaikan harga umum juga perlu diantisipasi karena adanya inflasi memberikan implikasi bahwa terjadi perubahan dalam teknologi yang memerlukan harga yang lebih tinggi.

Dalam Repelita V diharapkan tingkat

inflasi terjadi dibawah dobel digit. Upaya ini telah berhasil dilaksanakan dengan kenyataan bahwa antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1987 sebesar 8,9 % dan terendah terjadi pada tahun 1988. Dalam tahun 1990 inflasi mencapai angka 9,5 %, hal ini terutama terjadi karena permintaan masyarakat yang meningkat terhadap produk-produk baru, khususnya dalam sektor perumahan, kesehatan dan pendidikan.

3.1.6. Debt Service Ratio

Dalam pada itu, jika diamati dari Debt Service Ratio yang merupakan perbandingan antar kewajiban membayar ke luar negeri dengan penerimaan ekspor nampak dapat dikendalikan dengan baik. Antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 terjadi penurunan. Penurunan ini memberikan beberapa indikasi antara lain keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan dari ekspor, keberhasilan dalam mengendalikan impor pada komoditas terpenting dan pelunasan terhadap kewajiban membayar kewajiban ke luar negeri dengan baik. Angka DSR total pada tahun 1986 tercatat sebesar 36,8 % turun menjadi 32,1 % pada tahun 1989. Dengan adanya kondisi ekonomi dunia dewasa ini diperkirakan DSR pada tahun 1990 akan sedikit meningkat dan diperkirakan terletak pada 33,0 %.

3.1.7. Perkembangan Ekspor dan Impor

Perbandingan antara nilai ekspor dan nilai impor merupakan surplus penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan, jika kedua kegiatan ini disamping memberikan indikasi adanya sumberdana pembangunan tetapi juga menggambarkan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan luar negeri.

Indikator ekspor dan impor terdapat perkembangan yang nyata baik perbandingan antara nilai ekspor terhadap nilai impor juga pada komposisinya. Nilai ekspor pada tahun 1969/70 tercatat sebesar US \$ 1.044 juta meningkat menjadi US \$ 28.143 juta pada tahun 1989/90 dan diperkirakan meningkat lagi menjadi US \$ 29.493 juta selama tahun anggaran 1991/92. Sedangkan nilai impor tercatat sebesar US \$ 1.097 juta pada tahun 1967/70 meningkat menjadi sebesar US \$ 23.028 juta pada tahun 1990/91, dan pada tahun anggaran 1991/92 diperkirakan mencapai US \$ 23.430 juta. Perbandingan antara nilai ekspor dengan nilai impor meningkat dari 1,01 pada tahun 1967/70 menjadi 1,26 pada tahun 1991/92, yang berarti terdapat surplus nilai ekspor dibanding nilai impor.

Dalam pada itu komposisi nilai ekspor semakin menunjukkan kemampuan asli dari negara yang lebih bertumbuh pada kemampuan ekonomi masyarakat banyak. Hal ini tercermin dari komposisi nilai ekspor non migas yang semakin dominan dalam total ekspor. Komposisi ekspor migas yang lebih besar sejak tahun 1974/75 telah mulai berangsur digantikan oleh ekspor non migas. Pergeseran ini disatu pihak disebabkan volume ekspor dan nilai ekspor minyak yang semakin berkurang juga dengan kesiapan pelaku ekonomi yang semakin tinggi. Hikmah penurunan harga dapat diresponsi oleh kegiatan ekonomi asli nasional.

Peningkatan kemampuan ekspor komoditi non migas tidak semata-mata karena hikmah penurunan harga minyak, tetapi juga kebijaksanaan produksi dan ekspor. Deregulasi dan debirokratisasi yang tertuang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, moneter, perdagangan luar negeri dan kebijaksanaan lain yang terkait dalam kegiatan ini amat mendukung perkembangan nilai ekspor non migas.

Tahun 1986/87 merupakan titik belok perubahan komposisi nilai ekspor migas yang mulai digantikan oleh nilai ekspor non migas. Pada tahun 1987/88 nilai ekspor non migas mencapai 51,8 (US \$ 9.502 juta) dari total ekspor senilai US \$ 18.343 juta. Pergeseran komposisi nilai ekspor ini merupakan indikator penting dalam dunia usaha. Peluang usaha semakin besar. Namun demikian sejauh mana para bisnismen dapat mengantisipasi kesempatan ini dalam jangka yang panjang. Ekspor non migas merupakan kemampuan asli pelaku ekonomi yang mengikut sertakan sebagian besar anggota masyarakat. Meningkatnya kegiatan ekspor non migas tidak hanya meningkatkan kekuatan ekonomi dari sisi perdagangan internasional tetapi juga mencapai proses pembangunan yang berkembang tumbuh (sustainable development).

3.1.8. Perubahan Struktur Ekonomi

Dengan mengamati angka pertumbuhan sektor Repelita IV nampak bahwa sektor industri pengolahan mempunyai angka pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 1988 pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 13,0 %.

Pertumbuhan sektor tertinggi berikutnya adalah pada sektor listrik, gas dan air minum yang tumbuh pada tingkat 10,7 % setahun. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian tumbuh 4,3 % selama tahun 1988. Sedangkan sektor jasa tumbuh sebesar 4,3 % pada tahun 1988.

Dalam tahun 1988 tercatat PDB sebesar Rp 99.696,9 milyar Rupiah (pada harga konstan) atau Rp 139.452,1 milyar pada harga berlaku.

Dengan membagi PDB dalam tiga sektor kegiatan ekonomi yaitu : pertanian, industri pengolahan dan jasa, nampak terjadi adanya transformasi struktural yang memadai. Komposisi sumbangan sektor pertanian pada tahun 1969 sebagai awal Repelita I sebesar 49,3 % menurun menjadi 32,7 % pada tahun 1974 dan menurun lagi menjadi 24,1 % pada tahun 1988. Sektor industri pengolahan meningkat dari 9,2 % pada tahun 1969 menjadi 18,5 % pada tahun 1988. Sedangkan sektor jasa dan lain-lain meningkat dari 41,5 % pada tahun 1969 menjadi 57,4 % pada tahun 1988. Perubahan struktural ini sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang sedang membangun pada umumnya.

Sejalan dengan ini nilai PDB berdasarkan penggunaannya nampak meningkat dari Rp 84.470,3 milyar tahun 1985 menjadi Rp 117.631,0 milyar (harga berlaku).

Dalam pada itu komposisi sektor rumahtangga konsumen (C) dalam PDB berdasar penggunaannya adalah sangat dominan, sedangkan komposisi rumahtangga pemerintah (G) nampak semakin menurun, dan komposisi rumahtangga perusahaan (I) bertambah besar. Komposisi pada tahun 1985 tercatat

sebesar 57,3 % dari PDB merupakan pengeluaran pada rumahtangga konsumen 10,9 % pada rumahtangga pemerintah dan 22,4 % rumahtangga perusahaan. Pada tahun 1988 komposisi pengeluaran rumahtangga konsumen terhadap

IV. Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Kebijakan atau lebih tepat lagi adalah campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan. pada dasarnya diarahkan untuk mendukung dan menunjang berkembangnya potensi pembangunan masyarakat, melalui tiga bidang utama, yaitu penciptaan iklim usaha menggairahkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah : (1) tingkat kesempatan kerja yang tinggi, (2) peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, (3) tingkat pendapatan nasional yang tinggi, (4) stabilitas perekonomian : inflasi yang terkendali, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita secara riil dan tercapainya kesempatan kerja, (5) keseimbangan neraca pembayaran luar negeri, dan (6) pemerataan dalam distribusi pendapatan. Tujuan kebijakan tersebut ditujukan oleh perubahan nilai dari variabel target berupa variabel-variabel ekonomi agregatif, misalnya GDP, GNP, GNY, tingkat kesempatan kerja dan lainnya. Menurut arah perubahan dari variabel

target dikenal kebijaksanaan ekspansi, yakni untuk memperbesar kegiatan ekonomi dan kebijaksanaan kontraksi yakni untuk menurunkan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya upaya untuk mencapai 2 atau 3 tujuan seringkali tidak searah atau ada trade off.

Alat untuk mencapai tujuan kebijaksanaan sering disebut sebagai instrumen kebijaksanaan. Instrumen kebijaksanaan ini berupa variabel-variabel ekonomi. Berdasarkan instrumen kebijaksanaan yang digunakan, kebijaksanaan fiskal. Instrumen kebijaksanaan moneter adalah jumlah uang beredar. Sedangkan instrumen kebijaksanaan fiskal adalah pajak (Tx), transfer pemerintah/subsidi (Tr) dan pengeluaran pemerintah (G). Kebijakan moneter ditempuh dengan operasi pasar terbuka (open market operation), mengubah tingkat diskonto (rediscount policy), mengubah legal reserve ratio (minimum legal reserve ratio) dan pengawasan kredit secara selektif (selectif credit control), sedangkan cara keempat biasa disebut sebagai pengawasan kredit secara kualitatif (qualitative credit control). Kebijakan fiskal, secara ringkas, mempunyai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Kebijaksanaan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan tertuangkan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), yang dijabarkan setiap lima tahunan dalam REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan setiap tahun dijabarkan dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan menggunakan pendekatan sektoral dan regional.

Dalam sistem perekonomian pasar terkendali, pemerintah merupakan perencana pembangunan yang mengarah

sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah merencanakan langkah-langkah dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut diperlukan anggaran, dan dikenal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat pusat (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tingkat pemerintah daerah (APBD). (Lihat : Nota Keuangan, 1992 - 1993). Sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam melaksanakan pembangunan pemerintah melaksanakan kebijaksanaan anggaran pendapatan, berimbang dengan pengeluaran (balance budget policy).

4.1. APBN 1992/1993

Anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang disusun setiap tahun merupakan rencana operasional dari program pembangunan jangka panjang dan menengah, yakni GBHN dan Repelita. Penyusunan APBN didasarkan pada usulan dan kesesuaian dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan APBN dan kebijaksanaan pendukungnya senantiasa mengacu pada Trilogi Pembangunan. Telah disepakati bahwa Trilogi Pembangunan yang berisikan tiga rangkaian upaya pokok yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini ada tiga fungsi APBN yang

terkait dengan penjabaran Trilogi Pembangunan, yaitu fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi melalui pengalokasian dana pembangunan ke berbagai daerah serta fungsi stabilitas ekonomi melalui pengaturan yang seimbang antara sisi penerimaan dan pengeluaran (balance budget).

Untuk tahun anggaran 1992/1993, Rencana Anggaran dan Pendapatan Negara yang diajukan adalah sebesar Rp 56,108 trilyun, naik sebesar 11 persen dibanding dengan anggaran tahun 1991/1992 yang sedang berjalan. Rencana APBN 1992/1993 ini, sejalan dengan prioritas pengeluaran pembangunan Repelita V, diarahkan untuk, Pertama, pembangunan prasarana dasar yang menunjang kegiatan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat; kedua, penyediaan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat; ketiga, pengembangan sumberdaya manusia, dan keempat, penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana yang telah dibangun. Prioritas ini merupakan bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan.

4.1.1. Penerimaan

Ada dua sumber penerimaan dalam APBN, yakni penerimaan dalam negeri dan penerimaan (pinjaman luar negeri). Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan penerimaan di luar migas. Penerimaan di luar migas terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Cukai, Pajak Impor, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan pembangunan (pinjaman luar

negeri) terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Pada tahun 1973/1974, akhir Repelita I, penerimaan dalam negeri adalah sebesar Rp 967,7 milyar atau 82,5 % dari seluruh penerimaan. Penerimaan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan migas sebesar Rp 382,2 milyar (32,6 %) dan penerimaan di luar migas sebesar Rp 585,5 milyar (40,9 %). Sedangkan penerimaan pembangunan (pinjaman luar negeri) adalah sebesar Rp 203,9 milyar atau 17,5 % dari seluruh penerimaan. Kemudian pada tahun 1983/1984, tahun terakhir Repelita III, terjadi perubahan komposisi penerimaan APBN. Proporsi penerimaan dalam negeri berubah menjadi 78,8 % (dari seluruh penerimaan), terdiri dari penerimaan migas (naik menjadi) 52,0 % dan penerimaan di luar migas (turun menjadi) 26,8 %. Proporsi ini menurun dibandingkan proporsi pada tahun 1973/1974. Sebaliknya proporsi pinjaman luar negeri pada tahun 1983/1984 naik menjadi 21,7 %. Bertambah besarnya proporsi penerimaan migas dan pinjaman luar negeri diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Perubahan perimbangan antara penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan (pinjaman luar negeri) tersebut dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi internasional. Namun demikian peningkatan pinjaman luar negeri ini tidaklah permanen tetapi akan semakin mengecil sejalan dengan meningkatnya kemampuan untuk membiayai pembangunan.

Untuk tahun 1982/1983, sumber penerimaan RAPBN direncanakan berasal dari penerimaan dalam negeri; dari migas sebesar Rp 13,9 trilyun (24,78 %) dan

dari non migas sebesar Rp 32,6 trilyun (58,11 %), dan penerimaan pembangunan (pinjaman luar negeri) sebesar Rp 9,6 trilyun (17,11 %). Komposisi penerimaan ini menunjukkan pergeseran yang lebih mengarah pada kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dan memperkuat struktur penerimaan negara. Wujud dari kemandirian ini adalah bertambah tingginya proporsi penerimaan dalam negeri di luar migas, terutama pajak. Seberapa besar kemampuan menumpuk penerimaan dalam negeri di luar migas (pajak) masih akan ditentukan oleh perkembangan dalam negeri dan keberhasilan mengelola perekonomian nasional.

4.1.2. Pengeluaran

Pos pengeluaran dalam RAPBN dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran Rutin terdiri dari : (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Subsidi Daerah Otonom, (4) Bunga dan Cicilan Hutang, (5) Pembiayaan Cadangan Pangan dan (6) Lain-lain. Pengeluaran rutin ditujukan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat operasional. Sedangkan Pengeluaran pembangunan dialokasikan untuk membiayai berbagai program, proyek dan kegiatan pembangunan yang disalurkan melalui 18 sektor pembangunan. Di samping itu, pengeluaran pembangunan juga digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pengeluaran pembangunan daerah/Inpres ini merupakan cara yang efektif untuk pemerataan pembangunan dan redistribusi sumber daya ke berbagai daerah. Bantuan pembangunan daerah yang diserahkan langsung kepada daerah terdiri dari

program bantuan umum, program bantuan khusus dan program bantuan fasilitas khusus. Bantuan umum mencakup Inpres Pembangunan Desa (Bandes), Inpres Pembangunan Dati II dan Inpres Pembangunan Dati I. Bantuan Program khusus mencakup Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan, Inpres Penghijauan dan Reboisasi dan Inpres penunjang Jalan. Penggunaan bantuan pembangunan daerah tersebut ditentukan sendiri oleh daerah. Pada umumnya Inpres-inpres tersebut digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan swadaya masyarakat di daerah. Secara khusus, bantuan bantuan Inpres juga dimanfaatkan untuk Pengembangan Kawasan Terpadu. Melalui program PKT ini, kantung-kantung kemiskinan yang masih ada di daerah ditanggulangi dengan upaya dan dana khusus.

Dalam tahun 1973/1974, anggaran untuk pengeluaran rutin adalah sebesar Rp 713,3 milyar (61,3 %) dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 450,9 milyar atau 38,6 % dari total anggaran. Pada tahun 1983/1984, proporsi pengeluaran rutin adalah 45,9 % sedangkan pengeluaran pembangunan sebesar 54,1 % dari seluruh anggaran. Dalam RAPBN 1992/1993, pengeluaran rutin dianggarkan sebesar Rp 33.196,6 milyar (59,2 %) dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 22.912 milyar (40,8 %).

Inpres Desa dalam RAPBN 1992/1993 dianggarkan sebesar Rp 326,5 milyar. Dari jumlah tersebut masing-masing desa akan menerima Rp 4,5 juta. Jumlah ini termasuk Rp 900 ribu untuk membiayai kegiatan PKK di desa. Dilihat dari jumlah bantuan perdesa, jumlah Inpres Desa yang dianggarkan untuk tahun 1992/1993 ini

meningkat 45 kali lipat dibandingkan bantuan per desa tahun anggaran 1973/1974 dan meningkat hampir 29 % dibandingkan jumlah bantuan per desa pada tahun anggaran 1991/1992.

Inpres Pembangunan Dati II dinaikkan menjadi Rp 825,1 milyar atau Rp 4.000 per jiwa. Jumlah bantuan ini meningkat sebesar 40 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya. Di samping itu, bantuan minimumnya juga akan ditingkatkan dari Rp 200 juta per daerah menjadi Rp 750 juta. Dari seluruh program Inpres, peningkatan ini adalah paling tinggi dan untuk pertama kalinya anggaran Inpres Pembangunan Dati II lebih besar dari Inpres Pembangunan Dati I. Upaya ini harus dipandang sebagai langkah nyata untuk mewujudkan otonomi daerah tingkat II (desentralisasi) yang lebih besar.

Inpres Pembangunan Dati I untuk tahun anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp 20,8 milyar kemudian meningkat menjadi Rp 253 milyar pada tahun anggaran 1983/1984 dan Rp 594 milyar pada tahun anggaran 1991/1992. Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mendayagunakan program pembangunan sektoral dan daerah, mengembangkan prasarana ekonomi, dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah, maka alokasi bantuan bagi Pemerintah Dati I untuk tahun anggaran 1992/1993 ini ditingkatkan menjadi Rp 715,5 milyar.

Sedangkan bantuan khusus bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal, karena belum tersentuh program-program pembangunan dan menghadapi permasalahan khusus seperti: keterpencilan lokasi, keterbatasan sumberdaya alam, lahan kritis, kekurangan prasarana dasar dan sarana fisik dan kendala lainnya,

dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan Terpadu. Pada tahun 1989/1990 dilaksanakan di 12 kawasan di 12 propinsi. Untuk melaksanakan program ini, di 112 kawasan yang tersebar di 97 Dati II di 26 propinsi, pada tahun anggaran 1990/1991 disediakan dana sebesar Rp. 35 milyar. Kemudian ditingkatkan menjadi Rp 70 milyar untuk tahun anggaran 1991/1992 dan Rp 150 milyar untuk tahun anggaran 1992/1993.

V. Penutup

Dari format RAPBN 1992/1993 tersebut, ada tiga hal yang perlu diberi perhatian khusus. Pertama, upaya untuk mengubah perimbangan dalam sisi penerimaan. Perubahan ini diupayakan dengan meningkatkan penerimaan dalam negeri; utamanya dari pajak, dan mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pembangunan, yang notabene adalah pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan, seperti diketahui, umumnya ditentukan oleh kondisi dari negara donor dan bersifat tentatif atau tidak pasti. Dengan langkah ini maka pembiayaan pembangunan akan bertumpu pada sumber dana yang berasal dari dalam negeri sehingga pembiayaan pembangunan akan lebih pasti (stabil) dan pelaksanaan pembangunan akan lebih mandiri. Kemandirian ini tentunya akan menjamin

ketahanan dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, pos pengeluaran pembangunan dalam RAPBN 1992/1993 diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan. Pengentasan kemiskinan, dalam konteks yang lebih luas, dipandang sebagai proses redistribusi sumber-sumber ekonomi. Proses pemerataan ini tercermin dari : (1) pembangunan prasarana dasar yang menunjang kegiatan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat, (2) penyediaan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat, (3) pengembangan sumberdaya manusia, dan (4) penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana yang telah dibangun. Ketiga, meningkatkan jumlah bantuan yang dianggarkan untuk pembangunan daerah. Bantuan daerah ini mempunyai arti penting bagi pemerataan pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah. Sisi lain dari meningkatnya alokasi bantuan pembangunan Dati II adalah pemberian wewenang (otonomi) yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pelaksanaan pembangunan. Dengan wewenang ini maka pemerintah daerah, yang lebih tahu tentang kondisi dan permasalahan pembangunan yang ada di daerah, mempunyai keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Lampiran : 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1973/1974 - 1990/1991 dan RAPBN 1992/1993
(dalam milyar rupiah)

URAIAN	1973/1974 (Akhir Repeleta I)	1978/1979 (Akhir Repeleta II)	1983/1984 (Akhir Repeleta III)	1988/1989 (Akhir Repeleta IV)	1990/1991 (Tahun Kedua Repeleta V)	1991/1992 A P B N	1992/1993 R A P B N
1. Penorntman Dalam Negeri	637,70	4.266,10	14.432,70	23.004,30	39.546,40	40.184,00	46.508,40
a. Penorntman minyak bumi dan gas alam	322,20	2.308,70	9.520,20	9.527,00	-17.711,90	15.008,80	13.947,50
b. Penorntman di luar minyak bumi dan gas alam	315,50	1.957,40	4.912,50	13.477,30	21.834,50	25.175,20	32.560,90
2. Pengeluaran Rutin	713,30	2.743,70	8.411,80	20.739,00	29.977,70	30.557,80	33.196,60
3. Tabungan Pemerintah	254,40	1.522,40	6.020,90	2.265,30	8.548,70	8.628,20	13.311,80
4. Dana Bantuan Luar Negeri	203,90	1.035,50	3.882,40	9.990,70	9.904,60	10.371,50	9.602,00
a. Bantuan Program	69,80	48,20	14,00	2.040,70	1.396,60	1.537,50	601,20
b. Bantuan Proyek	114,10	887,30	3.667,50	7.950,00	8.507,80	8.834,00	8.990,80
5. Dana Pembangunan	458,30	2.557,90	9.903,30	12.250,00	18.453,30	18.997,70	22.912,00
6. Pengeluaran Pembangunan	450,90	2.555,60	9.899,20	12.250,70	18.452,00	18.997,70	22.912,00
a. Rupiah	336,60	1.568,30	6.031,70	4.300,70	10.944,20	11.163,70	13.813,00
b. Bantuan proyek	114,10	987,30	3.867,50	7.950,00	8.507,00	8.834,00	8.099,00
Surplus (+)/Defisit (-)	7,40	2,30	4,10	6,30	1,30	0,00	0,00

Sumber: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1992/93, Tabel IL24

Lampiran : 2 Penerimaan dalam Negeri
1973/1974 - 1990/1991 dan RAPBN 1992/1993
(dalam persen)

URAIAN	1973/1974 (Akhir Repeleta I)	1978/1979 (Akhir Repeleta II)	1983/1984 (Akhir Repeleta III)	1988/1989 (Akhir Repeleta IV)	1990/1991 (Tahun Kedua Repeleta V)	1991/1992 A P B N	1992/1993 R A P B N
1. Penerimaan dari minyak bumi dan gas alam	39,50	54,12	65,96	41,41	44,79	37,35	29,99
2. Penerimaan di luar migas	60,50	45,88	34,04	58,59	55,21	62,65	70,01
1. Pajak penghasilan (PPH)	14,50	14,47	13,39	17,17	17,08	19,96	23,50
2. Pajak pertambahan nilai (PPN)	10,88	8,12	8,75	18,58	18,07	20,47	23,72
3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2,07	1,59	1,00	1,84	2,05	2,09	2,13
4. Bea masuk	13,25	6,92	3,86	6,18	0,29	0,41	6,54
5. Cukai	6,38	5,93	5,36	6,04	4,85	5,51	5,25
6. Pajak ekspor	7,09	3,90	0,72	0,68	0,11	0,30	0,13
7. Pajak lainnya	1,29	0,46	0,36	1,27	0,62	0,87	0,76
8. Penerimaan bukan pajak	5,16	4,49	3,60	6,82	5,35	6,92	8,26
9. Penerimaan penjualan BBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
I + II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JUMLAH (dalam milyar rupiah)	967,70	4.266,10	14.432,70	23.004,30	39.546,40	40.184,00	46.508,40

Sumber: Diolah dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1992/93, Tabel IL26

Lampiran : 3 Pengeluaran Rutin
1973/1974 - 1990/1991 dan RAPBN 1992/1993
(dalam persen)

URAIAN	1973/1974 (Akhir Repeleta I)	1978/1979 (Akhir Repeleta II)	1983/1984 (Akhir Repeleta III)	1988/1989 (Akhir Repeleta IV)	1990/1991 (Tahun Kedua Repeleta V)	1991/1992 A P B N	1992/1993 R A P B N
1. Belanja Pegawai	37,70	36,51	32,78	24,10	23,47	25,37	27,55
2. Belanja Barang	15,44	15,29	12,57	7,19	6,11	7,20	7,33
3. Subsidi Daerah Otonom	15,23	18,04	18,39	14,85	14,13	15,25	15,87
4. Bunga dan Cicilan Utang	9,91	19,48	25,00	52,75	44,68	47,06	47,90
5. Lain-lain	21,73	9,69	11,27	1,31	11,62	6,11	1,35
JUMLAH (dalam milyar rupiah)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	713,30	2.743,70	8.411,80	20.739,00	29.977,90	30.557,80	33.196,60

Sumber: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1992/93, Tabel IL7

Lampiran : 4 Pengeluaran Pembangunan di Luar Bantuan Proyek
1973/1974 - 1990/1991 dan RAPBN 1992/1993
(dalam milyar rupiah)

URAIAN	1973/1974 (Akhir Repeleta I)	1978/1979 (Akhir Repeleta II)	1983/1984 (Akhir Repeleta III)	1988/1989 (Akhir Repeleta IV)	1990/1991 (Tahun Kedua Repeleta V)	1991/1992 APBN	1992/1993 RAPBN
1. Pembiayaan Departemen/Lembaga	167,30	851,00	1.480,30	1.855,30	4.853,70	6.447,30	8.038,20
2. Pembiayaan Pembangunan Daerah	85,70	431,10	1.447,50	1.491,70	2.977,70	3.975,10	4.951,20
a. Inpres Pembangunan Desa	5,70	24,00	91,60	112,00	180,60	249,90	328,50
b. Inpres Pembangunan Dati II	19,20	70,90	194,10	267,20	391,80	590,80	825,10
c. Inpres Pembangunan Dati I	20,80	84,60	253,00	334,30	488,00	594,00	715,60
d. Inpres Sekolah Dasar	17,20	111,80	549,30	130,50	373,50	521,70	689,10
e. Inpres Kesehatan	-	28,00	87,30	98,60	193,40	268,90	338,10
f. Inpres Penghijauan & Reboisasi	-	38,00	59,40	16,50	33,10	74,60	87,20
g. Inpres Panunjang Jalan	-	-	64,60	180,00	678,40	674,80	1.173,30
h. Inpres Pasar	-	1,20	10,60	3,00	3,00	3,00	3,00
i. Timor Timur	-	-	-	6,00	-	-	-
j. Pembangunan Daerah dengan Dana Ipeda/PBB	-	-	-	343,60	656,90	679,40	802,40
3. Pembiayaan lainnya	83,80	286,20	1.364,60	953,70	1.092,80	759,30	823,60
a. Subsidi Pupuk	-	-	-	200,00	264,70	175,00	175,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	-	125,00	322,80	95,00	145,40
c. Lain-lain	-	-	-	628,70	605,30	489,30	503,20
JUMLAH	336,80	1.568,30	4.031,70	4.300,70	8.944,20	11.181,70	13.813,00

Sumber: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1992/93, Tabel II.23

Lampiran : 5 Pengeluaran Pembangunan Menurut Sektor
1973/1974 - 1990/1991 dan RAPBN 1992/1993
(dalam persen)

SEKTOR	1973/1974 (Akhir Repeleta I)	1978/1979 (Akhir Repeleta II)	1983/1984 (Akhir Repeleta III)	1988/1989 (Akhir Repeleta IV)	1990/1991 (Tahun Kedua Repeleta V)	1991/1992 APBN	1992/1993 RAPBN
1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGARAH	21,76	17,54	40,18	13,17	14,74	14,08	12,80
2. SEKTOR INDUSTRI	7,38	6,13	22,58	3,65	2,78	2,48	2,27
3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	10,00	12,44	10,12	18,82	12,16	12,23	13,13
4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PERWISATA	17,61	16,10	6,72	18,41	18,76	18,84	18,14
5. SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI	6,00	0,48	0,87	2,57	1,90	1,44	1,27
6. SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	0,07	3,88	2,01	2,17	3,43	3,72	3,67
7. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA	18,48	10,72	3,29	8,28	11,53	12,04	12,74
8. SEKTOR AGAMA	0,13	0,29	0,24	0,14	0,22	0,26	0,29
9. SEKTOR PENDIDIKAN, GEMERLAWAN MUDA, KEREDAYAAN NASIONAL, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUNAN YANG MAHA ESA	6,18	6,79	4,54	13,11	12,79	12,62	13,19
10. SEKTOR KEKEMAHAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERIKAWAN, WANITA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,88	3,08	1,23	2,77	3,85	3,91	4,17
11. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMULGIAN	1,88	2,17	0,97	3,93	4,49	4,17	4,18
12. SEKTOR HUKUM	0,00	0,43	0,25	0,22	0,28	0,28	0,32
13. SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL	1,80	6,21	2,31	4,53	6,05	5,43	4,88
14. SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL	0,00	0,42	0,12	0,22	0,40	0,38	0,36
15. SEKTOR ILMU, PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENELITIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH	0,00	2,11	1,38	1,23	0,88	1,18	1,41
17. SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA URAHA	8,06	6,30	1,03	1,84	2,08	1,89	1,70
18. SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,43	0,65	1,84	1,86	1,67	1,67
JUMLAH (dalam milyar rupiah)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	450,80	2.568,80	22.733,00	12.250,80	18.224,00	18.987,70	22.912,00

Sumber: Ditah dan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1992/93, Tabel I.23